



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR, DPRD,
DAN DPD 2019 PROVINSI DKI JAKARTA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
(MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU,
DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI)**

J A K A R T A

SELASA, 16 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD 2019 Provinsi DKI Jakarta

PEMOHON

1. Partai Nasional Demokrat
(Pemohon Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
(Pemohon Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Ahmad Iman
(Pemohon Perkara Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Golongan Karya
(Pemohon Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti)

**Selasa, 16 Juli 2019, Pukul 13.42 – 14.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Anwar Usman
- 2) Arief Hidayat
- 3) Enny Nurbaningsih

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Rio Tri Juli Putranto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Andana Marpaung
2. Sona Sofyan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Guntur Fattahillah
2. Dwi Putri Cahyawati

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Radian Syam

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Daniel Tonapa Masiku
2. Vinsensius H. Ranteallo
3. Aan Sukirman

E. Termohon:

1. Muhaimin
2. Partahi Gabe
3. Livirta

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Absar Katabrata
2. Arif Effendi
3. Sutejo
4. Zahru Arqom

G. Bawaslu:

1. Fritz Edward Siregar
2. Burhanuddin
3. Puadi
4. Muhammad Jufri
5. Bella Natalia

6. Mahyudin

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Rahman
2. Utomo Karim
3. Joko F. Prabowo

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Eric Branado
2. Yusuf Kusuma
3. Joko Humboro

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Rheza Perdana
2. Surya Imam Wahyudi
3. Slamet Arifin
4. Sutejo Sapto Jalu

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Ya, sidang lanjutan mengenai perkara hasil pileg. Untuk sesi ke-2 ini, kita langsung mulai dari Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Nasdem, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDANA MARPAUNG (NASDEM)

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Gerindra, Pemohon?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GUNTUR FATTAHILLAH (GERINDRA)

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 3 Partai Kebang ... Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Kebangkitan Bangsa, hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Golkar, hadir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Kami hadir bertiga, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian, Termohon, hadir?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Lengkap.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Bawaslu?

14. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian Pihak Terkait untuk Perkara 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Demokrat, hadir?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. PPP?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAN (PPP)

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. PKS?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait Perkara 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Nasdem?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERIC BRANADO (NASDEM)

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Partai Amanat Nasional?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUSUF KUSUMA (PAN)

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tidak ada. Pihak Terkait 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PAN?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET ARIFIN (PAN)

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Gerindra?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RHEZA PERDANA (GERINDRA)

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita langsung ke Perkara 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Silakan, Yang Mulia. Siapa?

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Kita mulai untuk Perkara 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Baik, Termohon disilakan sudah seperti yang kemarin atau yang tadi, singkat-singkat saja. Yang pertama untuk ... ini Dapil DKI, ya?

31. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya, betul.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

DKI berapa yang perkara ini?

33. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Jakarta II. Dapil Jakarta II Luar Negeri.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

DKI II Luar Negeri, baik. Silakan jawabannya!

35. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan jawaban pada pokok ... pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pokok-pokoknya. Ada eksepsi, enggak?

37. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ada, Yang Mulia. Eksepsi (...)

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsinya apa ini?

39. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Eksepsi kita tentang permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, bukan kewenangan. Kenapa bukan kewenangan?

41. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Karena Pemohon mendalilkan bahwa Keputusan Bawaslu Nomor 968/K/Bawaslu/PM dan seterusnya tanggal 19 Mei 2019 adalah ... tersebut merupakan cacat hukum. Cacat hukum menurut kami, Termohon tidak tepat jika dibawa ke perselisihan Mahkamah di Mahkamah Konstitusi karena menurut peraturan perundang-undangan, Mahkamah hanya objeknya adalah tentang perselisihan hasil pemilihan umum SK yang dikeluarkan sama (...)

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi.

43. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

KPU RI.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalil mengatakan bahwa putusan KPU itu cacat hukum, itu bukan kewenangan Mahkamah, ya? Karena (...)

45. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Bukan, maksudnya keputusan Bawaslu cacat hukum didalilkan oleh Pemohon.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Keputusan Bawaslu?

47. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Di pokok permohonannya, butir 2 halaman 7.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

51. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Jadi, menurut hemat kami, ketika mendalilkan cacat hukum, maka Pemohon harus memohon untuk membatalkan putusan Bawaslu tersebut. Sehingga, untuk memohon pembatalan putusan Bawaslu harusnya tidak di persidangan ini, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

MK, ya, baik.

53. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mestinya kalau itu di mana itu? Di TUN, ya?

55. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sampai ke kasasi berarti itu? Menurut Pemohon ... menurut Termohon begitu?

57. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

59. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Intinya seperti itu.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

61. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu jawaban di halaman berapa itu?

63. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Jawaban di halaman 2 sampai dengan halaman 5, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, ada lagi eksepsinya?

65. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Cukup itu saja.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup? Sekarang pokok permohonan.

67. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Pokok-pokok permohonan. Pada intinya, ada beberapa di sini. Satu tentang kronologis dan kedua menolak dalil-dalil Pemohon.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

69. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Apakah perlu saya bacakan kronologisnya, Yang Mulia?

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kronologisnya dimulai dari apa?

71. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya, dari butir 2. Bahwa sebelum Termohon membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Ter ... Pemohon, dalam permohonan yang halaman 5 sampai dengan halaman 19.

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

73. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Termohon dengan ini mengajukan kronologis terjadinya perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

75. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Pada tanggal 11 April 2019, sekitar jam 14.00, Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur menerima informasi pertanyaan dari Pokja Pemilu Luar Negeri melalui Whatsapp yang di dalamnya terdapat video mengenai kasus dugaan pencoblosan surat suara yang terjadi di Taman Universiti SG Tangkas 43 ... 4300 Kajang dan Bandar Baru Wangi Selangor.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

77. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Atas informasi tersebut, Ketua dan Anggota PPLN Kuala Lumpur menghubungi Ketua dan Anggota Bawaslu Luar Negeri Kuala Lumpur melalui Whatsapp pribadi, WA grup PPLN Kuala Lumpur dan Panwaslu Kuala Lumpur, serta telepon untuk mengetahui kejadian tersebut lebih lengkap, mengingat Panwaslu Kuala Lumpur ada di lokasi (...)

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu dari ... sebentar saya potong.

79. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dari kronologis itu, kesimpulannya apa?

81. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Dari kronologis ini, ada rekomendasi dari Bawaslu Nomor 08-66/K.Bawaslu (...)

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

08?

83. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

08-66/K.Bawaslu/PM-06 (...)

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, he eh.

85. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang bagi pemilih di wilayah Kuala Lumpur yang berhak memilih melalui metode Pos sebanyak 319.293 pemilih.

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

87. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Dua, tidak melakukan penghitungan suara terhadap surat suara pemilu melalui metode Pos yang telah masuk ke dalam PPLN Kuala Lumpur.

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

89. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Tiga, KPU ... agar mengganti anggota PPLN atas nama Krishna K.U. Hannan dan penggantian anggota PPLN atas nama Djadjuk Natsir.

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

91. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Lanjut, Majelis, ada (...)

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, putusan Bawaslu itu dilaksanakan?

93. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya, dilanjutkan dengan ada ... dilaksanakan dengan pemungutan suara ulang.

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

95. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Pemungutan suara ulang terus ada penghitungan suara metode Pos di halaman 9 (...)

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang sampai pada tanggal 15-16 Mei itu?

97. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya, betul.

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

99. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

101. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Berdasarkan rapat rekapitulasi tersebut, perolehan suara akhir semua metode paslon yang di halaman 9, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

103. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Paslon Nomor Urut 1 adalah sebesar 60.580, Paslon Nomor Urut 2 sebesar 42.954 sedangkan untuk perolehan suara partai politik adalah sebagai berikut. PKB=6.347, Gerindra=11.726, PDIP=12.471, Golkar=2.750, Nasdem=57.864, Garuda=207. Dan selanjutnya, Majelis Hakim, mohon tidak dibacakan (...)

104. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu perhitungan suara yang benar menurut Termohon, ya?

105. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya. Yang pertama itu, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

107. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Yang belum ada rekomendasi dari Bawaslu.

108. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

109. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Terus, ada Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional pada tanggal 19 sampai 20, 2019 PPLN Kuala Lumpur telah mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Nasional Jakarta dan berdasarkan Keputusan Bawaslu menanggapi keberatan terhadap perhitungan suara ... surat suara yang diterima oleh PPLN tanggal 16 Mei 2019, maka surat suara sebanyak 60.278 cap Pos 15 Mei 2019 dan baru diterima PPLN tanggal 16 Mei 2019, tidak diperhitungkan. Sehingga surat suara PSU Pos yang dihitung hanya sebanyak 22.807.

Dengan demikian setelah adanya (...)

110. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar!

111. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

112. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu berarti tanpa pencoblosan yang di ... dikirim tanggal 16 Mei?

113. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

114. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

115. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Betul.

116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tanpa surat suara yang masuk 16 Mei, ya?

117. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

118. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

119. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Terus, dengan demikian setelah adanya keputusan Bawaslu tersebut, perolehan suara Pason Nomor Urut 1 adalah sebesar 50.049, dan Nomor Urut 2=26.630, sedangkan perolehan suara untuk masing-masing parpol menjadi ... saya bacakan untuk Nasdem saja, Majelis Yang Mulia?

120. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

121. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

22.558.

122. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

123. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Bahwa tindakan Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI Nomor SS 968 dan seterusnya, tanggal 19 Mei 2019 adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut.

“KPU berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu.”

Bahwa dengan demikian adalah tidak berdasar hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk membatalkan surat keputusan Termohon yang didasarkan pada ketaatan Termohon kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai Dapil Jakarta Timur VI, kami tidak bantah karena sudah dicabut.

124. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

125. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Langsung ke Petitem, Yang Mulia?

126. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

127. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Petitem. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya (...)

128. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

129. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Dua, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya bertanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

130. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

131. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Terima kasih, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Sekarang Pihak Terkait Demokrat. Apakah apa yang disampaikan oleh Termohon itu sudah benar?

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Jadi, yang disampaikan oleh Termohon itu sudah benar.

136. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah benar?

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Memang intinya itu kan awalnya ada kecurangan sudah dicoblos, terus akhirnya adalah PSU. Di situ ditentukan (...)

138. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kronologinya itu juga sudah benar, ya?

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Sudah benar semuanya.

140. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hasil akhir yang ditentukan oleh Termohon juga sudah benar?

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Sudah, sudah benar.

142. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang. Ada yang lain atau tambahannya? Menurut Pihak Terkait Partai Demokrat. Kalau tidak ada, berarti sudah confirm dengan apa yang disampaikan oleh Termohon?

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Ya, intinya dari (...)

144. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, ya?

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Sudah. Dari (...)

146. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tidak ada tambahan? Semuanya itu sudah benar. Dan perolehan suaranya juga Anda amini?

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Perolehan suaranya saya ... apa ... saya amini.

148. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke. Kalau begitu.

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Maksudnya setuju begitu.

150. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Ini ada ... tapi ada sedikit, tapi itu hanya minor saja (...)

152. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Yang (...)

154. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa yang minor itu yang akan Anda tambahkan?

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Di ... di beberapa TPS di Jakarta dibidang ada suaranya berkurang atau tambah, tapi kan bukti-buktinya tidak ada.

156. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Jadi ini, kita fokusnya ke sana saja yang (...)

158. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ke ... yang Kuala Lumpur, ya, yang persoalan besarnya, ya?

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Ya.

160. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Untuk Petitum sudah dianggap dibacakan.

162. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian untuk yang PPP, PPP. Apakah (...)

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAN (PPP)

Ya, Yang Mulia. Karena gugatan sudah di ... permohonan sudah dicabut, menurut kami sebagai Pihak Terkait (...)

164. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang untuk Dapil DKI berapa tadi Pemohon... eh, Termohon?

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAN (PPP)

Dapil VI DKI.

166. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil VI DKI?

167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAN (PPP)

Ya. Jadi memang karena permohonannya sudah dicabut (...)

168. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, berarti.

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAN (PPP)

Tidak perlu.

170. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak perlu, kan, ya?

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAN (PPP)

Terima kasih, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah dicabut. Karena tadi oleh ... apa ... oleh Termohon juga sudah tidak direaksi karena sudah dicabut, kan.

Ya, baik. Sekarang PKS?

173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Ya, Yang Mulia. Pada prinsipnya sama dengan Termohon, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Ya. Perbedaan (...)

176. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk dapil yang Kuala Lumpur, kan?

177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Oh, Dapil Kuala Lumpur. Dapil VI kami juga tidakanggapi karena sudah dicabut.

178. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Ya. Hanya mau memperjelas saja bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon pada butir 412 ... 27 jelas menyatakan bahwa menyerahkan sepenuhnya penafsiran surat KPU mengenai batas surat (...)

180. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Surat anu ... surat suara yang masuk per Pos itu, ya.

181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Ya. Itu kepada KPU dan Bawaslu.

182. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Artinya, yang berwenanglah bisa menafsirkan itu (...)

184. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah diputus dan itu sudah benar, ya?

185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Dan harus ditaati, betul, Yang Mulia.

186. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sesuai dengan ... tadi yang sudah sesuai dengan peraturan perundangan itu, ya.

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Betul, sama, Yang Mulia.

188. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Untuk Petitemnya kami minta me ... menetapkan, agar suara Dapil II DKI sesuai dengan DD-1 yang sudah ditetapkan oleh Termohon, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama berarti, ya?

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Betul, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, silakan, Yang Mulia, ada tambahan?

193. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya konfirmasi saja kepada PKS. Ini ada perbaikan Keterangan Pihak Terkait, ya? Pertama, disampaikan 8 Juli 2019, betul? Keterangan Pihak Terkaitnya? Dari PKS.

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Tidak ada perbaikan, Yang Mulia.

195. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada? Yang disampaikan yang mana, keterangannya?

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

8 Juli.

197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang 8 Juli ini, ya?

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Ya.

199. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan yang (...)

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Mungkin alat bukti, Yang Mulia.

201. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, yang 15 Juli itu hanya alat bukti saja?

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Ya. Alat bukti, Yang Mulia, betul.

203. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak termasuk per anu (...)

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Tidak ada perbaikan, Yang Mulia.

205. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada perbaikan, ya. Jadi yang dipakai tanggal 8 Juli, ya?

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Baik, Yang Mulia.

207. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

208. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, Bu ... Prof? Ya, terima kasih.

Sekarang dari Bawaslu masih ada catatan lain untuk yang dipersoalkan ini?

209. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami pada Bawaslu menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon atau KPU itu sama atau sesuai dengan rekomendasi Bawaslu yang hanya menerima atau hanya mengakui surat suara diterima KPU pada tanggal 15 Mei 2019.

210. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Yang 16 dianggap sudah tidak bisa karena sudah melewati batas waktu, ya?

211. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Benar, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sa ... hanya sampai tanggal 15, ya.

213. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Benar. Sebagaimana dengan (...)

214. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, perhitungan suara juga tidak ada masalah, ya setelah itu, ya?

215. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Tidak. Jadi, angka yang tadi disampaikan oleh KPU itu sesuai dengan hasil, sebagaimana yang didiskusikan atau dilakukan perbaikan terhadap Formulir DA-1 pada saat rekap ... rekapitulasi tanggal 19 Mei, Yang Mulia.

216. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Ada lagi?

217. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Cukup, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik. Terima kasih untuk semuanya, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Sekarang Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Gerindra permohonannya.

Ya, saya persilakan, Termohon.

219. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

220. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

221. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kami sebagai Kuasa dari Termohon, ingin memberikan jawaban terhadap Pemohon yang diajukan oleh Gerindra.

222. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

223. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Untuk daerah (...)

224. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini dapil berapa dulu ini?

225. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Ya, baik. Untuk daerah pemilihan DPR RI Dapil DKI Jakarta II.

226. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil Jakarta II, ya.

227. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Dan juga Dapil Jakarta III.

228. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dan Jakarta III.

229. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian, tadi juga se ... se ... sama untuk DPR ... DPRD Provinsi DKI Dapil VI sudah dicabut.

230. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

231. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Olehnya karena kami akan membahas ... akan menjawab tentang DPRD Provinsi DKI Dapil VII, Yang Mulia.

232. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil?

233. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

VII.

234. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

VII.

235. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Betul.

236. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

VII juga dicabut, ya. Ya?

237. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Baik, baik.

238. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ju ... belum ada suratnya, tapi sudah ada dicabut, ya? Oke.

239. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Lanjut, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

241. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Baik. Pada dasarnya, jawaban kami ada 2, Yang Mulia, berkaitan dengan eksepsi dan berkaitan dengan pokok permohonan.

242. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

243. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Berkaitan dengan eksepsi ber ... itu yang menyangkut tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana Pemohon secara tegas mendalilkan dan mempersoalkan tentang Rekomendasi Bawaslu Nomor 086/K dan seterusnya, tertanggal 16 April. Dan padahal, rekomendasi telah dilaksanakan oleh PPLN Kuala Lumpur, Berdasarkan Surat

Keputusan Ketua PPLN Kuala Lumpur Nomor 00010/Kuala Lumpur dan seterusnya.

244. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

245. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian, dalam dalilnya Pemohon juga mempe ... mendalilkan tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sudah barang tentu, menurut hemat kami ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan secara atributif kewenangan lembaga lain.

246. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

247. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian tentang legal standing, Yang Mulia. Mengenai DPR RI Dapil III, perseorangan mempersoalkan perolehan kursi partai politik.

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 jan ... 10 Juli 2009 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

Perselisihan hasil perolehan suara yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan a quo secara eksplisit adalah perolehan kursi partai politik, dimana yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan adalah partai politik.

Bahwa dalam permohonan a quo yang menjadi Pemohon adalah perseorangan Calon Anggota DPR Dapil Jakarta III atas ... atas nama Saraswati Djojohadikusumo. Oleh karenanya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan a quo karena mempersoalkan perolehan suara partai politik.

Sebagaimana dipahami, yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perselisihan yang menyangkut perolehan suara partai kursi adalah partai politik, sebagaimana Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

248. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

249. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian tenggang waktu, Yang Mulia. Dalam permohonan pertama pada tanggal 23 Mei dan teregis dalam APP Nomor 71 dan seterusnya hanya terdapat pengisian Anggota Calon DPR RI DKI Jakarta II, DPR Provinsi Dapil VI, dan DPR Provinsi VII.

250. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

251. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRAT

Kemudian dalam perbaikan permohonan ... Pemohon pada tanggal 1 mengajukan ... melakukan perbaikan, sekaligus mengajukan 1 permohonan baru, yaitu terhadap persoalan terkait pengisian Anggota Calon DPR RI Dapil DKI Jakarta III.

Kemudian, menambah dapil baru dalam pemeriksaan permohonan, yaitu DPR RI Dapil DKI Jakarta III.

Mengenai eksepsi ini, kami sudah menguraikan secara rinci dalam jawaban kami halaman 2 sampai halaman 7, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, untuk tenggang waktu juga sudah lewat kalau menurut anu, ya?

253. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Sudah lewat.

254. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena itu tanggal 1 Juli, ya?

255. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Betul, Yang Mulia.

256. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dan itu ditambahkan dapil yang tadinya enggak ada?

257. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Betul.

258. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

259. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Pokok Permohonannya. Berkaitan dengan DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Bahwa permohonan ... data perolehan yang digunakan Pemohon untuk mengajukan perolehan partai politik, termasuk Pemohon pada perhitungan suara pada pengisian Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II versi Termohon adalah tidak valid.

Bahwa dalil Pemohon yang didalilkan, suara Pemohon versi Termohon adalah 344.131 adalah tidak benar karena berdasarkan Lampiran II.19 Form Model DD1-DPR in casu objek permohonan suara Pemohon sebanyak 393.674. Sudah kami uraikan dalam jawaban kami angka 1 sampai dengan angka 8, halaman 9 sampai 13, Yang Mulia.

Kemudian, terdapat rekomendasi Bawaslu RI yang memerintahkan PSU di Kuala Lumpur dan telah dilaksanakan oleh PPLN Kuala Lumpur telah kami uraikan dalam jawaban kami angka 9, halaman 13 sampai 17.

Kemudian, berkaitan dengan DPR ... DPR RI Dapil II DKI Jakarta III persandingan suaranya sudah kami tampilkan. Kami sajikan di dalam jawaban kami. Jadi, mohon di angka 1, halaman 18, dan me-refer pada Surat Bukti T-001 DKI III dan seterusnya.

Merupakan fakta hukum perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III atas nama R. Saraswati Djojohadikusumo di Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading sejumlah 16.084, sedangkan perolehan Calon Anggota DPD Dapil II DKI itu atas nama S. Andyka di Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing, dan Kecamatan Kelapa Gading sejumlah 20.242.

Terhadap perolehan suara antara calon anggota DPR RI dengan perolehan suara calon anggota DPD dikarenakan jenis pemilu yang berbeda dan tidak dapat dipastikan pemilihan ... pemilihan pemilih terhadap calon anggota DPD akan sama dengan tandemnya pada calon anggota DPR RI.

Kemudian tentang pengisian Dapil VI telah kami sampaikan tadi untuk dicabut.

260. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dicabut.

261. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Termasuk juga Dapil VII.

262. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

263. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Oleh karenanya, kami mohon petitumnya.

264. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Petitum?

265. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Petitumnya, menerima eksepsi Pemohon seluruhnya.

266. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya,

267. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian, petitum yang lainnya sesuai dengan Jawaban kami, menya ... menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar, tetap berlaku surat keputusan KPU dan seterusnya. Dan mohon yang belum dibacakan dianggap dibacakan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

268. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Sekarang dari Nasdem, Pihak Terkait?

269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERIC BRANADO (NASDEM)

Terima kasih, Yang Mulia.
Dalam hal ini kami mengajukan Jawaban yang terdiri dari eksepsi yang pada intinya hampir sama dengan (...)

270. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama, ya, eksepsinya?

271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERIC BRANADO (NASDEM)

Ya. Terkait dengan Pemohon telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan permohonan.

272. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, intinya kalau Anda menekankan pada legal standing ... eh, kok legal standing ... tenggat waktu, ya?

273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERIC BRANADO (NASDEM)

Tenggat waktu, Yang Mulia.

274. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah melebihi karena 1 Juli ... 1 Juli itu perbaikan permohonannya masuk.

275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERIC BRANADO (NASDEM)

Ya, Yang Mulia.

276. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi ini merupakan penambahan dari dapil yang sebelumnya (...)

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERIC BRANADO (NASDEM)

Berbeda.

278. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pada awal tidak ada.

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERIC BRANADO (NASDEM)

Tidak ada, Yang Mulia.

280. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERIC BRANADO (NASDEM)

Dalam eksepsi juga, 1 lagi juga, mengenai obscur libel artinya (...)

282. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Permohonan kabur?

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERIC BRANADO (NASDEM)

Ya, permohonan kabur yang hanya menyertakan TPS-TPS, tetapi tidak memberikan rinci, berapa kehilangan yang dimaksud oleh Si Pemohon itu sendiri.

284. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERIC BRANADO (NASDEM)

Dalam pokok permohonan, hampir sama juga, Yang Mulia .
Bahwa Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 6, Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara, akan tetapi Pemohon tidak memberikan perincian di TPS-TPS mana? Dan berapa saja jumlah suara yang didalilkan?

286. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya hilang, ya? Ya.

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERIC BRANADO (NASDEM)

Dalam permohonan ... dalam eksepsi. Memohon untuk menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar Keputusan KPU 987, dan seterusnya.

Tiga. Menyatakan perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 untuk pengisian kursi Anggota DPR RI adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

288. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Sekarang, Pihak Terkait yang kedua, Pihak Terkait PAN.

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUSUF KUSUMA (PAN)

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

290. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUSUF KUSUMA (PAN)

Kami dari PAN, ingin menguraikan sedikit.

292. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUSUF KUSUMA (PAN)

Pada dasarnya bahwa kami menekankan pada daluwarsa tenggang waktu (...)

294. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, tenggang waktunya sudah lewat. Sama, ya? Eksepsi, ya.

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUSUF KUSUMA (PAN)

Sama dengan Termohon. Bahwa sudah melewati, dilakukan pada tanggal 31 Mei.

296. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUSUF KUSUMA (PAN)

Kemudian, mengenai permohonan yang tidak jelas. Bahwa dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan mengenai kesalahan perhitungan suara (...)

298. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUSUF KUSUMA (PAN)

Serta terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara, yang mempengaruhi suara Pemohon.

300. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUSUF KUSUMA (PAN)

Kemudian, tidak ada kejelasan dan ketidakkonsistennya Pemohon dalam menguraikan perhitungan suara. Sehingga, terjadi penggelembungan atau pengurangan suara, yang mempengaruhi suara Pemohon. Ini menyebabkan Permohonan Pemohon tidak jelas (...)

302. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUSUF KUSUMA (PAN)

Dan wajib ditolak. Dalam pokok permohonan, cukup. Dianggap dibacakan.

304. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dibacakan.

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUSUF KUSUMA (PAN)

Kita langsung ke Petitum saja.

306. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Petitumnya, ya?

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUSUF KUSUMA (PAN)

Yang Mulia. Bahwa umum saja menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, menyatakan benar Keputusan KPU RI secara Nasional, Nomor 987, dan seterusnya sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta III untuk pengisian kursi anggota DPR RI.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis, Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

308. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, dari PAN sudah. Berarti untuk Perkara 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah selesai. Ya.

Oh, Bawaslu, Bawaslu ada persoalan? Kalau enggak ada, enggak usah dipaksakan.

309. BAWASLU: MUHAMMAD JUFRI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu DKI Jakarta. Menanggapi ... menyampaikan keterangan dari Dapil III (...)

310. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di Dapil III, ada apa?

311. BAWASLU: MUHAMMAD JUFRI

Ya. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon menyandingkan perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon. Setelah Bawaslu melakukan, menyampaikan hasil ... mengecek hasil pengawasan, ternyata berbeda.

Bahwa hasil pengawasan Partai Gerindra, khususnya di halaman 20 kami cantumkan. Hasil pengawasan kami sebanyak 3.000 ... 344.131.

312. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ulangi! 3.000?

313. BAWASLU: MUHAMMAD JUFRI

3.000 ... eh, mohon maaf, 344.131.

314. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tuh, oke.

315. BAWASLU: MUHAMMAD JUFRI

Sedangkan, yang disampaikan oleh Pemohon, menurut versi Pemohon (...)

316. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

317. BAWASLU: MUHAMMAD JUFRI

Sebanyak 343.129, sedangkan versi Termohon=352.682.

318. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

319. BAWASLU: MUHAMMAD JUFRI

Nah. Kemudian, berdasarkan hasil dalil Pemohon. Mendalilkan bahwa ada selisih suara antara versi Termohon dan Pemohon, khususnya suara Saraswati di Nomor 2 di tabel yang ditampilkan. Ternyata apa yang kami, hasil pengawasan itu sama dengan versi Termohon, sebanyak 79.801. Sedangkan versi Pemohon, 83.959. Sedangkan, hasil pengawasannya Bawaslu sebanyak 79.801. Sama dengan versi Termohon.

320. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama dengan versi Termohon, ya.

321. BAWASLU: MUHAMMAD JUFRI

Kemudian, beberapa kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya penggelembungan suara atau selisih suara di beberapa kecamatan, khususnya, di Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing. Dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, mulai dari tingkat PPK sampai di tingkat kabupaten/kota. Tidak ada kami menemukan ada perselisihan suara, sampai di tingkat rekapitulasi di tingkat provinsi.

322. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada persoalan, ya?

323. BAWASLU: MUHAMMAD JUFRI

Tidak ada persoalan. Dan kami juga tidak ada laporan mengenai adanya perselisihan suara yang disampaikan oleh Partai Gerindra, khususnya Dapil III DPR RI. Terima kasih.

324. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada laporan, khusus Dapil III?

325. BAWASLU: MUHAMMAD JUFRI

Ya.

326. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, cukup?

327. BAWASLU: MUHAMMAD JUFRI

Cukup.

328. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terima kasih, Bawaslu.

Sudah selesai kita untuk Partai Gerindra. Ini cepat ini jalannya revolusi ini. Ya, kalau dibacakan semua, enggak selesai. Makanya kita pandu, supaya cepat selesai begini. Intinya yang harus dijawab saja.

Baik. Sekarang untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Pihak Terkait enggak ada. Silakan, Termohon.

329. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

330. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

331. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Yang Mulia, ini berkaitan dengan dapil ... pemilihan untuk pengisian Keanggotaan DPR RI, Dapil DKI Jakarta II Luar Negeri.

332. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

333. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Di ... berkaitan dengan eksepsi. Di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

334. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em?

335. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kalau kita merujuk kepada halaman 5 dan halaman 6 (...)

336. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

337. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, sebentar, sebelum dilanjutkan (...)

338. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, Mas, sebentar!

339. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang perlu saya klarifikasi dulu, ya? Ini terkait dengan yang akan disampaikan. Jawaban ini adalah yang tanggal 8 Juli, ya, Pak Arqom, ya?

340. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, benar, Majelis.

341. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

8 Juli. Ini memang yang tidak ada halamannya, ya?

342. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya?

343. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halamannya enggak ada, ya? Kemudian ... tidak ada juga yang terkait dengan eksepsinya di sini. Saya coba cari, eksepsinya enggak ada.

344. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kalau yang 5 Juli ada, Yang Mulia.

345. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya? Yang halaman kedua hilang. Ini halaman kedua ini pakai yang mana ini halaman kedua ini? Karena kalau mau saya cocokkan ... ini

mau klarifikasi, yang saya cocokkan anantara halaman satu yang terakhir itu adalah Kuasa Hukumnya Wilhelmus Rio Resandhi, ya?

346. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

347. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya cocokkan, kemudian saya lihat halaman 2, di soft copy-nya ada tapi. Tapi, ini masuknya sudah beda di sini, turun dia.

348. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Sepertinya salah cetak.

349. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Makannya ini yang eksepsinya enggak ada.

350. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau jawabannya kacau begini, KPU bisa ngurangi loh ini. Hati-hati.

351. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Honornya bisa kurang maksudnya, ya.

352. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh. Maksudnya dikurangin itu, ya.

353. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Itu salah cetak kemungkinan, Majelis.

354. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya? Ya ini eksepsinya yang enggak ada di sini.

355. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di dalam soft copy-nya ada, tapi di hard copy-nya enggak ada. Tapi ini soft copy ada kok.

356. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah di ... apakah sama ini, itu? Ya, betul?

357. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

358. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, pada waktu hard copy yang Anda kirimkan ke sini, ternyata tidak ada halaman 2. Tapi, setelah soft copy-nya kita lihat dan kita print out, ternyata ada halaman 2. Betul? Halaman 2 itu yang ... nomor apa yang paling atas itu, tertulis (...)

359. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. 16, Wilhelmus Rio Resandhi.

360. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

16, Wilhelmus Rio Resandhi ? Terus yang di bawah, B) Kedudukan Hukum?

361. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, betul.

362. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu, benar?

363. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, benar.

364. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti waktu Anda menyerahkan print out-nya, hard copy-nya itu tidak lengkap. Tapi untung kita juga minta soft copy-nya. Jadi lengkap sekarang. Sudah, enggak ada persoalan, inggih, Prof?
Silakan, sekarang!

365. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

366. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak jadi dikurangi. Ya, KPU, ya jangan dikurangi. Lengkap kok ini.

367. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Sudah berat ini, Prof.

368. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, berat.

369. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Masih dikurangi.

370. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Eggak kok, sudah lengkap kok ini. Makannya ini saya sudah bilang, "Ini sudah lengkap, jangan dikurangi." Pesannya.

371. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Terima kasih, Yang Mulia.

372. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

373. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kalau kita merujuk kepada permohonan Pemohon di Posita 1, itu mengait kepada adanya pelanggaran oleh PPLN, Ketua KPU DKI Jakarta. Kemudian, KPU Republik Indonesia, dan Bawaslu dan selanjutnya, ini saya kira ini berkaitan dengan etik.

Jadi, merupakan kewenangan DKPP. Kemudian selanjutnya juga, berkaitan dengan Posita 2 dan Posita 3 Permohonan Pemohon, ini mengait kepada alamat fiktif dan DPT fiktif, sehingga itu merupakan

kewenangan ... karena baik ... berkaitan dengan pelanggaran administratif pemilu, maka ada kewenangan Bawaslu.

Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan ... ada komentar lain, berkaitan dengan permohonan Pemohon ini.

374. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

375. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Petitumnya ternyata tidak mencantumkan ... pembatalan keputusan KPU, sehingga juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

376. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, yang menjadi obyek bukan Putusan KPU Nomor 987?

377. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Bukan. Jadi, di dalam halaman 7 permohonan Pemohon, Petitumnya adalah menyatakan PPLN Kuala Lumpur telah memen ... memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak jelas.

Dua, menyatakan surat suara pemungutan suara ulang yang dikirim melalui Pos, baik yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur, sebelum tanggal 15 Mei 2019, dan yang melewati batas waktu yang diterima pada tanggal 16 Mei 2019 menjadi tidak sah dan tidak dapat dihitung sebagai surat suara sah.

378. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, bukan ... anu ... ya, Putusan KPU Nomor 987, ya?

379. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

380. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang minta dibatalkan, malah yang di Kuala Lumpur itu, ya?

381. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Inggih.

382. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

383. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Baik. Saya lanjutkan (...)

384. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti kalau begitu, ini di anu ... di eksepsi? Termasuk di eksepsi, enggak? Atau sudah masuk ke pokok permohonan?

385. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Bahwa (...)

386. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Antara posita dan petitumnya tidak nyambung, atau tidak konsisten gitu, atau? Ini sudah masuk ke pokok permohonan.

387. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Itu termuat ... itu termuat di dalam permohonan Pemohon itu cacat formil.

388. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

389. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Karena sesuai dengan ... PMK Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu itu sudah tidak memenuhi syarat-syaratnya.

390. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi di dalam permohonannya di depan, yang dipersoalkan kan Putusan KPU 987. Tapi, ternyata di Petitumnya malah tidak membatalkan itu, tapi membatalkan yang di Kuala Lumpur, gitu kan? Coba, ya? Begitu, betul, begitu?

391. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Tidak juga, Majelis.

392. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh.

393. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Jadi ... makannya, saya tadi menyampaikan adalah mereview dari permohonan Pemohon yang tadi itu kewenangan DKPP, kemudian alamat fiktif dan DPT fiktif itu juga berkaitan dengan pelanggaran pemilu yang kewenangan Bawaslu.

Kemudian, ini dicampur dengan pokok permohonan yang Pemohon atas nama Ahmad Iman, itu merasa dengan adanya ... apa namanya ... DPT fiktif dan alamat yang dimanipulasi itu merasa bisa mendapatkan suara yang lebih dari 208 suara.

Nah, di TPS mana? Dan bagaimana? Tidak dijelaskan di dalam permohonannya, sehingga kami hanya ... di dalam pokok perkara hanya menyandingkan ... berkaitan perolehan suara, yakni Partai Kebangkitan Bangsa adalah 30.501 dan untuk Caleg DPR RI atas nama Ahmad Iman 13.720 seperti itu. Hanya itu yang bisa kami sampaikan.

394. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya.

395. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian, petitum dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon.

Pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987 dan selanjutnya.

396. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

397. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Itu, Majelis.

398. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih.

Ini tidak ada Pihak Terkait. Bawaslu, saya kira juga enggak ada ini, ya?

Oke. Sudah selesai ini.

Ya, yang terakhir. Saya kira baru Magrib kita selesai, ternyata pukul 15.00 WIB saja belum, sudah selesai.

Ya. Ini agendanya sebetulnya sampai Maghrib.

Baik, sekarang yang terakhir. Yang permohonan Partai Golkar, pihak terkaitnya PAN dan Gerindra. Saya persilakan!

399. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan menyampaikan pokok-pokoknya saja, jadi secara keseluruhan jawaban kami mohon dianggap dibacakan.

400. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

401. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Baik, jawaban Termohon untuk Permohonan Register Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Golkar untuk Keanggotaan DPR RI Dapil DKI Jakarta III. Di dalam jawaban kami, kami juga menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya, eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan.

Yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Di TPS-TPS mana? Atau di desa atau kecamatan mana? Kesalahan penghitungan tersebut terjadi. Tidak diuraikan. Oleh karena itu, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat.

Dalam pokok permohonan. Dalam dalilnya pada pokoknya Pemohon mempersoalkan selisih perso ... eh, perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Partai PAN. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai PAN 123.537 suara. Sedangkan, perolehan suara Pemohon 80.414 suara. Sehingga, terdapat selisih 43.123 suara.

Masih menurut Pemohon. Berdasarkan data DAA-1 di setiap kelurahan menunjukkan selisih suara yang cukup besar, sehingga berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon, dan kemudian menggelembung atau menambah perolehan suara partai lain. Hal mana dapat dilihat berdasarkan rekap tingkat Kotamadya Jakarta Utara dan Jakarta Barat DB-1 ... DB-1 menurut Pemohon, ya.

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mempersandingkan data C-1 dengan DAA-1 di 77 desa dari 11 kecamatan Dapil DKI Jakarta III. Namun yang dipersandingkan Pemohon, bukan antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Partai PAN, melainkan jumlah perolehan partai politik menurut versi Termohon dan versi Pemohon di 77 desa dari 11 kecamatan. Sebagaimana dimaksud di dalam permohonan Pemohon.

402. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

403. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Atau dengan kata lain, Pemohon mempersandingkan jumlah surat suara sah versi Pemohon dan versi Termohon di 77 desa dari 11 kecamatan, sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon. Sebagaimana tabel persandingan Pemohon halaman 7 sampai dengan halaman 11.

Sebagai contoh, misalnya di Kecamatan Cilincing, di Kelurahan Cilincing menurut Pemohon perolehan suara partai politik adalah 24.469. Menurut versi Termohon 25.618, sehingga ada selisih 1.149 dan seterusnya. Jadi, dia mempersandingkan perolehan partai politik secara keseluruhan.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemohon menjumlahkan keseluruhan perolehan suara partai politik di 77 desa dari 11 kecamatan tersebut dalam 2 versi, yaitu Pemohon, jumlah perolehan suara di partai politik di 77 desa dan dari 11 kecamatan tersebut adalah 1.478.414. Ini pun jumlahnya sebetulnya, Yang Mulia ... Yang Mulia, juga keliru setelah kami koreksi juga adalah 1.562.000 sekian.

404. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

405. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Versi Termohon menurut ... menurut versi Termohon jumlahnya adalah 198.270. Setelah kami koreksi jumlah ini pun juga keliru, yang benar adalah 1.673.000 sekian. Selisihnya menurut Pemohon adalah 2.006 sekian itu pun juga keliru yang sebenarnya adalah 110.000 sekian, sebagaimana tabel permohonan halaman 11 angka 7 (...)

406. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, dalil-dalil mengenai angka ... perolehan angka itu sebetulnya kalau ... anu ... keliru ya?

407. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Juga salah. Ya.

408. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

409. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Berdasarkan persandingan tersebut, tiba-tiba Pemohon menetapkan perolehan suara parpol yang benar menurut Pemohon berdasarkan Form DC-1, yakni sebagaimana tabel permohonan halaman 11 angka 8.

410. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

411. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Saya kira hal ini juga enggak ada relevansinya (...)

412. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

413. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Jadi ... tidak berdasar. Yang pada pokoknya, menetap ... yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara Pemohon adalah 135.628 suara dan perolehan suara PAN ditetapkan 119.49 ... 451 suara. Jadi, suara Pemohon bertambah 55.24 ... 214 suara. Yang semula 80.414 suara.

Suara Partai PAN berkurang 408 suara, yang 123.537 suara. Suara Pemohon untuk bisa bertambah lima pu ... 55.214. Jadi, suara Pemohon ini bertambah 55.214 suara. Pemohon juga mengurangi suara partai-partai lain untuk bisa menambah angka sebesar itu, yakni Partai PKB, Gerindra, PDIP, Nasdem, dan PKS, PSI, dan PAN ini semua berkurang setelah kami teliti.

Yang Mulia, sesungguhnya Termohon kesulitan untuk menanggapi dalil Pemohon yang tidak jelas tersebut. Meskipun seandainya, Termohon tanpa harus membuktikan atau mengajukan alat bukti, saya kir ... saya yakin bahwa permohonan Pemohon tersebut juga tidak bisa ... tidak terbukti. Karena uraian posita maupun bukti yang diajukan sama sekali tidak menguntungkan dalil Pemohon.

Namun, demikian, untuk membantah persandingan perolehan suara partai politik di 77 desa, dari 11 kecamatan ... dari 11 kecamatan tersebut, Termohon cukup menyampaikan Bukti DAA-1 ... DAA-1 di 77 desa dari 11 kecamatan tersebut. Karena Bukti DAA-1 sudah bisa menggambarkan perolehan partai politik di 11 ... di 77 desa tersebut. Gas (...)

414. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu dibuatkan tabel enggak, oleh Pemohon?

415. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Kami sampaikan di tabel. Ada, Yang Mulia.

416. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada.

417. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Di tabel halaman 10, 14. Dari (...)

418. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Halaman ... halaman berapa?

419. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Halaman 10 sampai 14.

420. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

10 sampai 14.

421. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Ya.

422. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang menarasikan, tabel itu menarasikan bukti yang tadi diajukan?

423. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Ya. Yang berdasarkan DAA-1 yang tadi sudah.

424. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

425. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Sebagaimana Bukti T-003.

426. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-003, ya.

427. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Jadi, Termohon juga menetapkan bahwa peroleh ... perolehan partai poliik di 11 ... di 77 desa, 11 kecamatan tersebut tidak sama, sebagaimana yang ditetapkan oleh atau yang menurut versi (...)

428. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang didalilkan Pemohon?

429. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Ya.

430. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

431. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Sehingga tidak benar. Termohon juga menyampaikan hasil rekap perolehan suara yang benar berdasarkan DC.

432. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

433. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Sebagaimana tabel Pemohon, halaman 14 angka 30. Antara lain, perolehan Pemohon yang benar adalah 80.414 suara. Di dalam jawaban itu, tertulis 40.414. Kami koreksi, Yang Mulia.

434. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

435. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Jadi, yang benar adalah perolehan suara Pemohon adalah 80.414 suara.

436. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

437. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Sedang perolehan suara PAN adalah yang benar menurut Termohon adalah 123.537 suara.

438. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

439. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Demikian jawaban Termohon dan jawaban Termohon ini juga kami lengkapi dengan kronologi dan tanggapan dari KPU Kota ... KPU daerah dan kronologi dan tanggapan tersebut juga sudah kami lampirkan ... kami lampirkan dalam Bukti T-005.

440. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

441. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Untuk ... apa ... jika ada tambahan. Bahwa dalam persidangan ini, kami juga membe ... apa ... menambah alat bukti.

442. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

443. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

1 alat bukti.

444. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

445. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Dan sudah diterima oleh MK.

446. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kepaniteraan, ya.

447. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Di samping itu juga kami akan memperbaiki daftar alat bukti Termohon. Yang pertama adalah T-0 ... yang ada di dalam Bukti T-001.

448. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

449. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Ada alat bukti yang tidak tercatat di dalam T-001, yaitu T ... DC, TTD ... DCDH, DC-2, DC1-DPR dan sudah kami perbaiki dan sudah diterima oleh Mahkamah, tadi sebelum persidangan dimulai.

450. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Persidangan. Baik.

451. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Saya kira cukup, Yang Mulia.

452. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Petitumnya dianggap telah dibacakan. Karena ini nya (...)

453. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Di petitum dianggap dibacakan.

454. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tadi yang sudah disepakati.

455. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Pada dasarnya, menolak Permohonan Pemohon.

456. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

457. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Terima kasih.

458. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dan suara yang benar itu tadi, ya?

459. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Ya.

460. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk Pemohon, 80.414, sedangkan untuk PAN seri ... 123.537 itu, ya?

461. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Ya.

462. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

463. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

464. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Sekarang untuk Pihak Terkait PAN. Intinya, sama sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon?

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET ARIFIN (PAN)

Sama, Yang Mulia.

466. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama. Ada tambahan?

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET ARIFIN (PAN)

Ada. Terima kasih, Yang Mulia. Agar persidangan ini cepat selesai sebelum pukul 16.00 WIB, kami pokok-pokok saja kami bacakan.

468. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Enggak, ini pukul 14.30 WIB kok, selesainya.

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET ARIFIN (PAN)

Siap.

470. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jangan sampai pukul 15.30 WIB.

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET ARIFIN (PAN)

Dalam eksepsi, permohonan dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

472. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET ARIFIN (PAN)

Dalam pokok permohonan, di alinea ke-3. Bahwa permohonan dalam permohonan yang mendalilkan adanya kesalahan perhitungan, perolehan suara oleh Termohon, yang semula 80.414 suara, seharusnya menjadi 135.628 suara. Sedangkan, untuk Partai Amanat, yang semula 1.000 ... 120 ... maaf, 123.537 suara, seharusnya menjadi sera ... 119.451 suara.

Dalam dalilnya, ini Pemohon menam ... menampilkan tabel perbandingan perolehan suara antara C1-DPR ... DPR dengan DA1-DPR dari berbagai kelurahan yang berasal dari 11 kecamatan.

Bahwa keseluruhan tabel permohonan sebanyak 11 kecamatan tersebut, sangat tidak jelas. Karena perolehan suara antara C-1 dengan DA-1 yang dimaksudkan oleh Pemohon itu untuk partai apa? Apakah untuk permohonan ataukah untuk Partai PAN? Karena apabila yang dimaksud Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon, sebagaimana dalilnya semula 80.414 suara menjadi 135.628 suara dan untuk Partai PAN semula 123.537 suara menjadi 119.451 suara.

Maka, tabel yang disa ... yang disandingkan untuk setiap kelurahan harus berisi perolehan suara untuk Partai PAN dan Pemohon. Ketidakmampuan Pemohon dalam merincikan penjumlahan suara untuk setiap kecamatan dimaksud membuktikan dalil Pemohon tidak jelas. Ketidakjelasan ini akan menyulitkan Mahkamah dalam merumuskan materi pemeriksaan dalil-dalil Pemohon lainnya. Oleh karenanya, ba ... permohonan Pemohon selain tidak mendasar juga harus dikesampingkan.

Langsung ke petitum, Yang Mulia?

474. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu tambahannya, ya?

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET ARIFIN (PAN)

Siap.

476. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebetulnya intinya sama seperti Termohon tadi.

477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET ARIFIN (PAN)

Sama, Yang Mulia.

478. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Petitum.

479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET ARIFIN (PAN)

Dalam ... dalam eksepsi. Menerima eksepsi dari Pihak Terkait, menjatuhkan putusan dismissal berupa gugurnya permohonan Pemohon. Dalam pokok perkara, memohon permohonan Pemohon untuk seluruhnya menyatakan benar Keputusan KPU RI secara nasional Nomor 198 ... 87 dan seterusnya.

480. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET ARIFIN (PAN)

Sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta III untuk pengisian kursi anggota DPR RI.

482. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET ARIFIN (PAN)

Atau apabila Yang Mulia, Majelis Mahkamah Konstitusi, mendapat ... mendapatkan ... berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih.

484. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

Jadi, Anda mengakui bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon 80.414 dan PAN sendiri 123.537, ya. Yang benar itu, kan?

Baik. Sekarang Pihak Terkait Gerindra, ada?

485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ada, Yang Mulia.

486. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, sama, Partai Gerindra?

487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya. Untuk melengkapi waktu mungkin sampai Magrib, kami bacakan semua, Yang Mulia.

488. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Waduh itu ... ya, silakan!

489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

490. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebelum ... sebelum dibacakan sampai Subuh (...)

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya.

492. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau saya bilang sam ... jangan Magrib, Subuh sekalian. Jadi begini, ini ada dua permohonan, ya. Ada ... bukan permohonan. Ada dua keterangan, ya?

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia.

494. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Keterangan yang pertama, tanggal 5 Juli.

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, benar, Yang Mulia.

496. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang berikutnya tanggal berapa?

497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Tanggal 15.

498. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

15 Juli. Yang 15 Juli ini ju ... jelas sudah terlambat ini, ya.

499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Oh, kalau begitu pakai yang lama juga enggak apa-apa.

500. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, pakai yang lama ndak apa-apa, ya. Betul, ya?

501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Sama saja, Yang Mulia.

502. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sama saja. Baik kalau begitu kita pakai sekarang keterangan yang tanggal 5 Juli, ya.

503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

504. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang pokok ... tetap yang dibacakan yang pokok-pokok saja.

505. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya. Intinya bahwa dalam eksepsi, kami tetap sama dengan Termohon.

507. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ada sedikit mungkin dari kami masalah legal standing dari ter ... Pemohon yang intinya bahwa di situ disebutkan nama Erlangga har ... Hartanto. Padahal, yang di ... kita ketahui bahwa Ketua Golkar itu Airlangga Hartanto.

509. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, itu, Yang Mulia. Dalam pokok permohonannya (...)

511. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, huruf ... hurufnya A sama Er yang beda itu, ya?

512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia. Sedikit.

513. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Untuk selanjutnya, Yang Mulia, kami bacakan bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) PMK menurut Pihak Terkait jelas menganut prinsip ke ... ketidakadilan bagi Pihak Terkait. Karena keterangan pasal a quo tidak memberikan ruang bagi Pihak Terkait maupun partai peserta pemilu dalam mengkritisi keputusan Termohon.

Padahal, tidak semua keputusan yang diambil oleh Termohon telah benar. Karena faktanya keputusan Termohon nyatanya masih terdapat permasalahan dalam proses perhitungan perolehan suara,

belum juga mencapai 100% secara nasional. Salah satunya salah ... salah input oleh petugas kelompok KPPS. Mayoritas dari jumlah yang kurang disebabkan karena kondisi salah memasukkan Formulir C-1.

Selain daripada itu, Dapil III DKI Jakarta juga mengalami permasalahan hukum terkait perolehan suara. Yakni ditangkapnya Ketua PPK Cilincing bernama Idi Amin serta anggotanya. Dan juga, PPK Koja, dia ini Alim Sori dan beserta anggotanya.

Sehingga, sangat wajar akibat kesalahan dari kesalahan Termohon jika Pemohon dan Pihak Terkait menuntut adanya keadilan bagi kepada Termohon untuk mengubah penetapan a quo, di karena masih banyak permasalahan hukum seperti ditangkapnya Ketua PPK Cilincing dan anggotanya.

Bahwa Mahkamah sebagai pengawas Konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dengan baik, jika dalam menangani sengketa hasil pemilu hanya menghitung perolehan suara secara sistematis semata. Namun, harus mempertimbangkan fakta hukum yang nyata dan ... dan bukti-bukti yang ada.

Bahwa Pemohon, Pihak Terkait menuntut keadilan dalam perolehan kursi ke-8 Dapil DKI Jakarta. Di mana pokok Pemohon merasa kehilangan satu kursi dengan perolehan 135.628 atau kehilangan 55.214 suara. Sedangkan, Pihak Terkait telah kehilangan suara sebanyak 29.556 suara, termasuk di dalamnya suara Caleg DPRT ... DPR atas nama R. Saraswati Djojohadikusumo, sebanyak 4.158 suara. Seharusnya perolehan suara Pihak Terkait sebesar 373.687 suara, namun berdasarkan perhitungan suara Termohon, Pihak Terkait hanya memperoleh 344.131 suara.

Bahwa dalam Permohonan Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/VII/2019 tanggal 7 Juni, Mahkamah berpendapat, "Peraturan Perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan karena memang tidak mungkin untuk dilaksanakan."

Mengingat dalam perkara yang bernuansa perselisihan kepentingan yang bersifat private, sebagai badan peradilan, sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya. Mahkamah lebih berada pada posisi netral, tidak berpihak. Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak. Kecuali, pada akhirnya melalui putusan Mahkamah. Baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan Termohon termasuk in casu Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan diajukan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, maka sangat beralasan jika Pihak Terkait berkepentingan terhadap Perselisihan Hasil Pemilu Daerah DKI Jakarta III. Demi mempertimbangkan rasa keadilan, maka Pihak Terkait terhadap hasil perolehan suara, apalagi ternyata penetapan permohonan tersebut menimbulkan permasalahan perolehan suara baik

bagi Pihak Terkait di mana dalam permohonan Pemohon, perolehan suara Pihak Terkait menyusut sebanyak, yakni 34.056 suara seharusnya berjumlah ... Pemohon seharusnya berjumlah ... eh, Pihak Terkait seharusnya berjumlah 273.687 suara, sehingga sangat wajar jika Pihak Terkait masuk sebagai pihak dalam perkara a quo, demi menjaga atau mempertahankan perolehan kursi pertama Pihak Terkait yang seharusnya atas nama R. Saraswati Djojohadikusomo, maupun mengisi perolehan suara kedua untuk mendapat kursi Pihak Terkait atas nama H. Kamrussamad, S.T., M.Si.

Bahwa dalil Pihak Terkait, serta sekaligus juga (...)

515. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sebentar, sebentar! Anda itu di sini Pihak Terkait menanggapi Permohonan Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia, benar.

517. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, kenapa Anda juga berbicara masalah Permohonan Nomor 160? Itu yang jadi masalah.

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, ini yang ... kan karena di sini, kami menyusut, Saudara ... Yang Mulia. Suara kami menyusut karena perselisihan dari Golkar.

519. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, kalau begitu suara ... suara Anda menyusut. Tadi, di awal Saudara mengatakan bahwa apa yang ditentukan oleh Termohon itu benar. Sekarang Anda di sini mengatakan menyusut.

520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Untuk eksepsinya, Yang Mulia.

521. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Terutama untuk eksepsinya, kami bersepakat, Yang Mulia.

523. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, hanya eksepsi?

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, untuk pokok permohonan (...)

525. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian (...)

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Kami punya pendapat sendiri, Yang Mulia.

527. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang begini, yang terakhir, Anda kalau begitu, perolehan suara yang benar ... ini sudah ditentu ... dicantumkan, suara ... perolehan suara dari Partai Golkar, itu 80.414. Terus, kemudian PAN 123.537. Nah, sekarang Gerindra berapa, berapa Gerindra?

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Gerindra 373.687, Yang Mulia.

529. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berapa?

530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

373.687.

531. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

373.687.

532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

373.687.

533. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

373.687. Ini diperoleh dari mana?

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Dari hasil C-1, Yang Mulia. Kita temukan, Yang Mulia.

535. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

C-1-nya berupa C-1 apa?

536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

C-1 ... apa ... C-1 ... C-1, Yang Mulia.

537. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, C-1 itu kan macam-macam.

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Bukan C-1 Plano, C-1 DPR RI.

539. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, saya sekarang cross-check ke sini, ya.

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia.

541. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cross-check ke sini. Terus, Anda mempersoalkan apa lagi? Partai mana lagi?

542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Sudah, Yang Mulia, Partai Golkar saja, Yang Mulia.

543. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Gerindra 373.687?

544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia.

545. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang, Termohon. Pada waktu Anda menetapkan Pihak Pemohon 814 dan PAN 123.537, itu Partai Gerindra di sini juga ada kan, di situ? Dapat suara berapa menurut Termohon?

546. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Gerindra.

547. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

548. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

344.131.

549. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

344.131 ini. Jadi, menurut Termohon, ya, suara yang benar yang diperoleh Partai Gerindra adalah 340.137. Nah, mestinya Anda tidak bisa menjadi Pihak Terkait di sini, tapi Anda harus mengajukan permohonan tersendiri untuk menggugat ini.

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia. Kami sekaligus ... apa ... membantu mempertahankan dari permohonan awal kami, Yang Mulia.

551. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, ya enggak ... posisinya enggak di situ.

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya.

553. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Posisinya enggak mesti di situ.

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, makanya kami kan meminta kewenangan dari Mahkamah sendiri nanti yang memutuskan.

555. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, nanti kita yang menilai.

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, makanya kan kami mengajukan ini nanti, nanti Mahkamah, silakan menilai, gitu, Yang Mulia.

557. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, kita bisa juga menilai begini nanti. Bahwa keberadaan Pihak Terkait pada Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu tidak tepat karena Saudara tidak mempersoalkan perolehan suara yang berhubungan dengan PAN dan Golkar, gitu.

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya, itu kewenangan Mahkamah, silakan. Saya kembalikan kepada Mahkamah, Yang Mulia.

559. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya itu (...)

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Saya kembalikan kepada Mahkamah, Yang Mulia.

561. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Harus dinilai juga Keterangannya, kan?

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya.

563. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena ini mempersoalkan hal yang lain, bukan mempersoalkan yang dipersoalkan Golkar, gitu ya?

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Siap, Yang Mulia.

565. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus terakhir, sekarang Petitumnya apa Anda, mengatakan apa?

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Intinya menerima dan mengabulkan permohonan Pihak Terkait dan menyatakan sah bukti yang Pihak Terkait ajukan, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon (...)

567. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Dan untuk ... apa ... menetapkan R. Saraswati D. Djojohadikusumo sebagai calon anggota DPR nomor terpilih, Yang Mulia. Untuk kursi pertama dan kedua untuk Kamrussamad, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

569. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Jadi baru kali ini ada satu konstruksi peradilan ... apa ... di MK dalam penyelesaian PHPU yang agak ... agak keluar dari ... anu ... Jadi begini, sebetulnya di dalam proses PHPU itu, Pemohon berhadapan dengan Termohon. Sedangkan Pihak Terkait itu hanya memberi keterangan. Keterangannya Pihak Termohon itu benar atau salah, itu saja. Karena yang berhadapan tuh ini. Sana dan Bawaslu itu namanya saja bukan jawaban, tapi pemberi keterangan, itu. Ya, jadi kalau pemberi keterangan itu bisa menghadirkan saksi oleh Mahkamah, boleh saja, boleh juga tidak, termasuk Bawaslu. Saksi itu dari Pemohon dan dari Termohon.

Nah, dalam pemberi keterangan itu, apakah keterangan yang diberikan oleh Termohon itu benar atau tidak? Lho, ini kok malah mempersoalkan Termohon sendiri. Itu kan jadi lucu konstruksinya, kan? Ini menjadi pemikiran kita bersama, ini jadi aneh filosofinya, gitu lho, ya. Gimana salah ... salah duduk? Ah iya, duduknya mestinya di sana, itu. Ini, ya?

Ya, tapi ini nanti ... anu ... dinilai. Ini agak ... anu ... ini kita juga agak ... apa ... kaget juga, ternyata kok begini.

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya. terima kasih, Yang Mulia.

571. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Terima kasih.

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Ya.

573. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi sudah didengar dalam persidangan ini, ya?

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO SAPTO JALU (GERINDRA)

Terima kasih, Yang Mulia.

575. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, Bawaslu ada persoalan?

576. BAWASLU: MAHYUDIN

Ada, Yang Mulia.

577. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

578. BAWASLU: MAHYUDIN

Terima kasih.

Atas permohonan Pemohon ini, kami akan menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon mendalilkan ada perpindahan suara sebesar 43.123 suara yang kemudian juga di dalam sisi lain telah memperinci perolehan suara di 11 kecamatan itu sebesar 206.871 suara.

Oleh karena itu, kami dari Bawaslu hanya akan menyampaikan data hasil pengawasan kami melalui tabel yang disebutkan di dalam keterangan, yang tidak kami bacakan dengan total keseluruhan adalah sebesar 29.706.

Nah, terhadap permohonan a quo ini, berdasarkan hasil pengawasan, kami tidak menemukan adanya pelanggaran ataupun laporan yang disampaikan oleh pelapor ... Pemohon ataupun Pihak lain berkaitan dengan sengketa a quo. Demikian, Majelis.

579. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

Jadi, tidak ada laporan sama sekali dan tidak ada keberatan pada waktu rekapitulasi?

580. BAWASLU: MAHYUDIN

Tidak ada, Majelis Yang Mulia.

581. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Terima kasih.

582. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Yang Mulia?

583. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mana ini? Termohon? Silakan!

584. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Termohon dari KPUD ingin, dari KPU Daerah ingin menyampaikan sesuatu.

585. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

586. TERMOHON: MUHAIMIN

Terima kasih. Izin (...)

587. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ini antara Prinsipal dan kuasa hukumnya beda, enggak, enggak beda?

588. TERMOHON: MUHAIMIN

Sama.

589. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, sama. Ya sudah, Apa yang mau disampaikan (...)

590. TERMOHON: MUHAIMIN

Ya. Izin, Yang Mulia.

591. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

592. TERMOHON: MUHAIMIN

Terkait dengan apa yang disampaikan Pihak Terkait, tadi perlu saya klarifikasi berkaitan dengan adanya penangkapan. Jadi tidak ada penangkapan (...)

593. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

594. TERMOHON: MUHAIMIN

Terhadap PPK, yang ada adalah laporan ke Bawaslu dan itu tidak terkait dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon.

595. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

596. TERMOHON: MUHAIMIN

Itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

597. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih atas informasinya.
Jadi, tidak ada penangkapan tadi yang disebut PPK di Cilincing dan di mana tadi?

598. TERMOHON: MUHAIMIN

Tidak ada, bukan (...)

599. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada sama sekali?

600. TERMOHON: MUHAIMIN

Tidak ada penangkapan.

601. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

602. TERMOHON: MUHAIMIN

Tapi proses di Bawaslu.

603. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, kalau di Cilincing mungkin penangkapan ikan ada ya itu, ya?

604. TERMOHON: MUHAIMIN

Siap. Tapi menurut tersangka ada, Yang Mulia.

605. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih.
Saya kembalikan waktunya kepada, Pak Ketua. Terima kasih.

606. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.
Jadi alhamdulillah, baru pukul 14.45 WIB, kita masuk ke tahap pengesahan alat bukti.
Untuk Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Termohon mengajukan bukti T-001 s.d. T-001. Benar, Termohon?

607. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Benar, Yang Mulia.

608. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PKS, mengajukan Bukti PT-A sampai dengan PT-D dan PT-1 sampai dengan PT-5. Benar, Pihak Terkait PKS?

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Benar, Yang Mulia.

610. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Partai Demokrat, PT-1 sampai dengan PT-6, benar?

611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Benar, Yang Mulia.

612. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Bawaslu mengajukan Bukti PK-12.44, PK-12.49, benar?

613. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Benar, Yang Mulia.

614. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pekara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan T-006 untuk Dapil DKI Jakarta II, benar?

615. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Benar, Yang Mulia.

616. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, T-001 untuk Dapil DKI Jakarta III, benar?

617. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Benar, Yang Mulia.

618. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Partai Nasdem, untuk Dapil DKI Jakarta III, alat buktinya PT-1. Benar?

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERIC BRANADO (NASDEM)

Benar, Yang Mulia.

620. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu, buktinya PK-12.11 sampai dengan PK-12.32, benar?

621. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Benar, Yang Mulia.

622. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, Perkara Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Termohon mengajukan bukti T-001, benar? Termohon?

623. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAHRU ARQOM

Ya, benar, Yang Mulia.

624. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Bawaslu, Bukti PK-1.1 sampai dengan PK-1.15, benar?

625. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Benar, Yang Mulia.

626. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan T-007, benar? Termohon?

627. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIF EFFENDI

T-006, Yang Mulia.

628. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, 7? Kelebihan, ya? Dicabut?

629. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIF EFFENDI

Ya, sampai 6.

630. KETUA: ANWAR USMAN

T-001 sampai dengan (...)

631. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIF EFFENDI

Perkara 174, ya, Yang Mulia?

632. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

633. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIF EFFENDI

Sampai T-006, Yang Mulia.

634. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi T-001 sampai dengan T-006?

635. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIF EFFENDI

T-006. Ya.

636. KETUA: ANWAR USMAN

Biasanya kurang, ini malah lebih.

637. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIF EFFENDI

Ya, maaf. T-007.

638. KETUA: ANWAR USMAN

Ah, gimana sih.

639. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIF EFFENDI

Rekap ... rekap terakhir, rekapan tanda tangan para saksi.

640. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Konsenlah, anda yang mengajukan kok anda yang mengingkari? Gimana ini?

641. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIF EFFENDI

Maaf, Yang Mulia.

642. KETUA: ANWAR USMAN

Saya ulangi, ya. T-001 sampai dengan T-007?

643. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIF EFFENDI

Benar, Yang Mulia.

644. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Gerindra, PT-1 sampai dengan PT-47, benar?

645. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RHEZA PERDANA (GERINDRA)

Benar, Yang Mulia.

646. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PAN, PT-1 sampai dengan PT-27 untuk Dapil DKI Jakarta III, benar? Ya, dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-12.33 sampai dengan PK-12.43, Bawaslu?

647. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Benar, Yang Mulia.

648. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Ya. Alhamdulillah sudah selesai.

Sekarang pengumuman. Tolong diperhatikan. Jadi hasil persidangan untuk 4 perkara ini akan dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, bagaimana kelanjutan dari hasil rapat itu, mohon tunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan mengenai hasilnya, ya, apakah akan berhenti atau akan diteruskan persidangannya. Ya, kemudian nanti ancar-ancarnya tanggal 22, ya. Tapi, sekali lagi, untuk resminya tunggu surat panggilan atau pemberitahuan dari kepaniteraan. Sudah jelas, ya? ya, baik. Dengan demikian sidang (...)

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pemohon, Partai Golkar Perkara 174.

650. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Jika diperkenankan, kami Pemohon minta daftar alat bukti Termohon dan jika diperkenankan kami mohon untuk inzage.

652. KETUA: ANWAR USMAN

Inzage.

653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Terima kasih, Yang Mulia.

654. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. silakan. Nanti untuk daftar bukti, bisa minta ke Panitera. Ya? Cukup?

655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Cukup, Yang Mulia.

656. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.52 WIB

Jakarta, 16 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001